**ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN, PERHITUNGAN,
PEMOTONGAN DAN PELAPORAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA
(TER) PADA PAJAK PENGHASILAN 21 PT. XXX**

**Putri Angellita¹, Firda Tri Bidandari², Elfriska³, Dinda Amanah Hayyu⁴, Marsya Aliya Dini
Ruslan⁵, Dwi Fionasari⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Riau

Email : angelitap959@gmail.com¹, firdatribidandari@gmail.com², 210301001@student.umri.ac.id³,
210301044@student.umri.ac.id⁴, 210301019@student.umri.ac.id⁵, dwifionasari@umri.ac.id⁶

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan bentuk pajak yang dikenakan terhadap pendapatan karyawan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencatatan, perhitungan, pemotongan, serta pelaporan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh 21 di PT. XXX. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari perusahaan serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa PT. XXX masih menerapkan metode tarif progresif dalam perhitungan pajak pada awal tahun 2024, meskipun regulasi terbaru mengharuskan penggunaan metode TER. Penerapan TER memberikan manfaat bagi karyawan dengan pendapatan tetap, namun bagi karyawan dengan pendapatan yang bervariasi, metode ini berpotensi menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya pembaruan sistem pencatatan pajak menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses pemotongan dan pelaporan. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan yang diberikan meliputi perbaikan sistem pencatatan yang lebih akurat dan terintegrasi, peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak, serta penyesuaian kebijakan internal perusahaan agar selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Implementasi sistem perpajakan yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, memastikan terpenuhinya regulasi pajak, serta meminimalkan potensi kesalahan iklan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Perhitung

Abstract

Income Tax Article 21 (PPh 21) is a form of tax imposed on employee income in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of recording, calculation, deductions and reporting using the Average Effective Tariff (TER) method in PPh 21 at PT. XXX. The research approach used is a qualitative descriptive method by collecting primary data from companies as well as secondary data obtained from various related literature. Research findings indicate that PT. XXX will still apply the progressive rate method in tax calculations at the beginning of 2024, even though the latest regulations require the use of the TER method. The application of TER provides benefits for employees with fixed incomes, but for employees with varying incomes, this method has the potential to cause tax overpayments. In addition, the lack of updates to the tax recording

system causes discrepancies in the withholding and reporting processes. Therefore, the recommendations for improvement include improving the recording system to be more accurate and integrated, increasing transparency in tax reporting, as well as adjusting the company's internal policies so that they are in line with applicable tax regulations. It is hoped that the implementation of a more optimal tax system can increase company efficiency, ensure compliance with tax regulations, and minimize the potential for advertising errors.

Keywords: *Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Calculation*

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh 21 pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PPh 21 diberlakukan sebagai bentuk kontribusi wajib dari individu dan badan usaha terhadap pendapatan negara. Khusus untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, PPh 21 mulai berlaku pada tahun 1984. Pajak ini menjadi penting karena mengatur pemotongan pajak langsung atas penghasilan karyawan. Seiring berjalannya waktu, tarif dan kebijakan PPh 21 mengalami banyak perubahan.

Dalam akuntansi, tarif efektif rata-rata digunakan untuk mencatat kewajiban pajak dalam laporan keuangan. Ini membantu perusahaan dan individu dalam merencanakan pajak dan mengelola arus kas. Memahami tarif efektif rata-rata juga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak pajak terhadap laba bersih dan keputusan bisnis. Penerapan metode baru ini memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam menghitung PPh 21. Tarif ini diberlakukan pada 1 Januari 2024.

Perubahan metode perhitungan ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, metode perhitungan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) ini memiliki kendala dalam perhitungan, terdapat fenomena yaitu dimana tidak semua karyawan PT. XXX memiliki penghasilan tetap sehingga yang seharusnya karyawan yang jumlah gajinya tidak memenuhi minimum untuk membayar pajak pertahun tetapi dengan metode perhitungan TER ini karyawan harus membayar pajak setiap bulannya meski saat diakumulasikan penghasilan bruto setahun, penghasilan bruto tidak mencapai PTKP.

Sistem Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan Pada PT. XXX untuk membantu perusahaan dalam menilai keefektifan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan PT. XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang didirikan pada tahun 2000.

PT. XXX juga mempunyai jumlah pegawai dengan spesifikasi gaji yang tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, PT. XXX juga berpotensi terhadap lebih bayar pajak yang diakibatkan oleh penghasilan bruto yang tidak menentu setiap bulannya akibat Tunjangan Prestasi (Tunjangan Tidak Tetap) yang hanya didapatkan karyawan saat mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan dan pada bulan April kemarin karyawan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga menyebabkan penghasilan bruto menjadi lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan potongan PPh 21 jauh lebih besar dan mengakibatkan lebih bayar dan kurang bayar. Indikasi perbedaan penghasilan bruto tersebut dapat dilihat dari information yang diperoleh peneliti berikut ini:

Tabel 1.1 Penghasilan Pajak 21 Bulan Februari 2024

No	Nama Pegawai	Status	Gaji	T. Prestasi	Penghasilan Bruto	PPh 21 TER
1	Pegawai A	TK/0	4.300.000	2.000.000	6.300.000	47.250
2	Pegawai B	TK/0	4.300.000	3.000.000	7.300.000	91.250
3	Pegawai C	TK/0	4.500.000	3.000.000	7.500.000	93.750
4	Pegawai D	TK/0	4.500.000	3.000.000	7.500.000	93.750
5	Pegawai E	TK/0	4.100.000	2.000.000	6.100.000	45.750
6	Pegawai F	TK/0	4.100.000	1.000.000	5.100.000	-
7	Pegawai G	TK/0	3.900.000	3.000.000	6.900.000	86.250

Sumber: PT. XXX, 2024

Tabel 1.2 Penghasilan Pajak 21 Bulan Maret 2024

No	Nama Pegawai	Status	Gaji	T. Prestasi	Penghasilan Bruto	PPh 21 TER
----	--------------	--------	------	-------------	-------------------	------------

1	Pegawai A	TK/0	4.300.000	1.000.000	5.300.000	-
2	Pegawai B	TK/0	4.300.000	1.000.000	5.300.000	-
3	Pegawai C	TK/0	4.500.000	3.000.000	7.500.000	93.750
4	Pegawai D	TK/0	4.500.000	2.000.000	6.500.000	65.000
5	Pegawai E	TK/0	4.100.000	3.000.000	7.100.000	88.750
6	Pegawai F	TK/0	4.100.000	3.000.000	7.100.000	88.750
7	Pegawai G	TK/0	3.900.000	2.000.000	5.900.000	29.500

Sumber: PT. XXX, 2024

Tabel 1.3 Penghasilan Pajak 21 Bulan April 2024

No	Nama Pegawai	Status	Gaji Dan THR	T. Prestasi	Penghasilan Bruto	PPh 21 TER
1	Pegawai A	TK/0	8.600.000	2.000.000	10.600.000	265.000
2	Pegawai B	TK/0	8.600.000	2.000.000	10.600.000	265.000
3	Pegawai C	TK/0	9.000.000	2.000.000	11.000.000	330.000
4	Pegawai D	TK/0	9.000.000	2.000.000	11.000.000	330.000
5	Pegawai E	TK/0	8.200.000	2.000.000	10.200.000	229.500
6	Pegawai F	TK/0	8.200.000	2.000.000	10.200.000	229.500
7	Pegawai G	TK/0	7.800.000	2.000.000	9.800.000	196.000

Sumber: PT. XXX, 2024

Berdasarkan 3 tabel diatas, terlihat bahwa tidak semua karyawan dikenakan potongan PPh 21 setiap bulannya, namun saat bulan April semua karyawan dikenakan potongan PPh yang cukup besar sehingga memungkinkan lebih bayar pajak dan kurang bayar saat perhitungan masa pajak terakhir. Menurut Fitriah dan Devi (2021), perusahaan diperbolehkan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap, dengan memastikan pemotongan sesuai peraturan, termasuk mempertimbangkan PTKP berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016. Surat keterangan pemotongan pajak harus diberikan dalam dua bulan setelah akhir tahun, dan kredit pajak wajib mencakup pajak terutang sesuai Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

Menurut Cristiana (2017), pendataan penerimaan bruto dilakukan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, termasuk penghasilan tidak kena pajak atau dikenakan pajak final.

Herduard R (2015) menyebutkan, perusahaan wajib mencatat kewajiban pajak secara akurat dan melakukan pemotongan berdasarkan penghasilan bruto sesuai aturan UU Pajak.

Penelitian Fitriah dan Devi Herviana (2015) menemukan bahwa perhitungan PPh 21 di CV Nusantara tidak sesuai aturan, seperti tidak menambahkan THR, salah memotong iuran BPJS, dan menyamakan tarif pajak untuk pegawai dengan dan tanpa NPWP.

Kawulusan (2021) menyimpulkan, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 di PT Pegadaian Persero Manado Timur telah sesuai dengan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016. Penyampaian SPT dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut Lunenburg (2012), teori kepatuhan merupakan pendekatan integrasi ide-ide dari model klasik dan keterlibatan manajemen. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan situasi di mana orang mengikuti perintah dan aturan tertentu. Kepatuhan mengacu pada ketaatan atau kepatuhan terhadap seluruh aktivitas sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pengertian Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan adalah pajak pemungutan yang dilakukan oleh negara terhadap penghasilan orang perindividu atau lembaga/organisasi hukum, berupa gaji, keuntungan lembaga/organisasi, komisi, atau penghasilan lain yang tetap atau tidak teratur yang didapatkan selama tahun pajak peduli jika ada.

Pajak penghasilan 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain yang mencakup pekerjaan, jasa, dan segala kegiatan pegawai. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh suatu negara atas penghasilan orang perseorangan atau badan hukum, baik berupa gaji, keuntungan badan, hadiah, komisi, atau sumber penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang diperoleh selama tahun pajak. PPh 21 merupakan potongan pajak atas penghasilan

berupa gaji, tunjangan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun tidak tetap.

Tarif Efektif Rata – Rata (TER) PPh Pasal 21

Pada saat pemungutan tarif pajak penghasilan 21 tahun 2024, akan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif yang mengacu pada perundangan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan Pajak. Pasal 21 pajak penghasilan 21 terhadap penghasilan pekerjaan, jasa, Pajak individu. bentuk pemicu pajak penghasilan 21 memiliki dua bagian yaitu:

1. Tarif Efektif Rata- Rata (TER)

PPh 21 menghitung pajak penghasilan pribadi pegawai untuk masa pajak bulan 01 (Januari) sampai dengan bulan 11 (November) atau masa pajak selain masa pajak terakhir.

Tarif efektif pemotongan pajak untuk PPh 21 meliputi:

- a. Tarif efektif bulanan
- b. Tarif efektif harian

Tarif pajak efektif bulanan dikategorikan berdasarkan Jumlah Penghasilan Bebas Pajak (PTKP) tergantung pada status perkawinan.

2. Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

Tarif pajak progresif Pasal 17 yang tadinya merupakan cara penghitungan PPh 21, tapi kini hanya digunakan untuk menghitung pajak pada masa pajak terakhir, misalnya bulan Desember atau bulan kerja terakhir pegawai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan temuan penelitian, namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. XXX, yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28289.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memahami penerapan perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 di PT. XXX. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan di perusahaan, yang memberikan informasi spesifik tentang cara perhitungan pajak penghasilan karyawan dan kebijakan pajak yang diterapkan. Data ini mencerminkan kondisi lapangan secara mendalam.

Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur seperti artikel, jurnal, dan buku yang relevan, yang menyediakan konteks teoretis dan standar regulasi pajak di Indonesia. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teori dan pelengkap bagi data primer. Dengan menggabungkan kedua jenis data, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih lengkap dan valid tentang penerapan TER PPh 21 di perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Saat ini, PT XXX mempekerjakan 10 (sepuluh) pekerja yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Pekerja Tetap serta Pekerja Tidak Tetap. Pekerja tidak tetap dipekerjakan berdasarkan kontrak yang berlaku selama proyek berlangsung. Guna melindungi ketertutupan identitas karyawan tetap di PT XXX, nama mereka diganti dengan simbol huruf. Pengkajian ini fokus pada perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif TER, pencatatan, pemotongan tarif TER dan pelaporannya. Perhitungan PPh Pasal 21 guna pendapatan karyawan tetap dilakukan dengan memakai sampel sebanyak 7 pegawai dari Januari sampai Desember tahun 2024, tidak ada kenaikan upah. Dalam menghitung pajak bagi pegawai tetap di PT XXX pada tahun 2024, daftar penghasilan dapat dijadikan acuan.

Tabel 3 : Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT XXX di Pekanbaru

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan yang disetahunkan
----	--------------	--------	-------------------------------

1	Pegawai A	TK/0	74.200.000
2	Pegawai B	TK/0	79.900.000
3	Pegawai C	TK/0	94.500.000
4	Pegawai D	TK/0	88.500.000
5	Pegawai E	TK/0	83.300.000
6	Pegawai F	TK/0	77.300.000
7	Pegawai G	TK/0	80.700.000

Sumber : PT XXX di Pekanbaru Tahun 2024

Bersumberkan daftar penghasilan Tabel 3, perincian PPh Pasal 21 per bulan dilakukan dengan menggunakan:

- Tarif Pajak Progresif untuk pegawai tetap A dapat dilakukan sebagai berikut :

Penghasilan selama setahun Rp. 74.200.000

Pengurangan : - Biaya Jabatan (Rp. 3.710.000) - PTKP (TK/0) (Rp. 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Rp. Rp.16.490.00 PPh 21 Terutang : Lapisan 1 = 5% X
Rp.16.490.000

= 824.500/th

Pajak terutang per bulan Rp. 68.708.

- Tarif Efektif Rata Rata (TER) untuk pegawai tetap A : Penghasilan setahun Rp. 74.200.000
Penghasilan per bulan Rp. 74.200.000 : 12 = Rp. 6.183.333

Pegawai A masuk kategori TER A, karena status PTKP nya TK/0. Penghasilan Rp. 6.183.333 masuk pada kategori Rp. 5.950.001 – Rp. 6.300.000, yaitu 0,75% untuk tarif besaran pajaknya berarti Rp. 6.183.333 X 0,75% = 46.374 per bulannya. Berarti Perhitungan Pajak memakai biaya efektif rata - rata menghasilkan perhitungan pajak PPh 21 yang lebih kecil, sebesar Rp. 22.334 dibandingkan dengan menggunakan perhitungan progresif, hal ini sangat menguntungkan bagi karyawan dalam melunasi pajak PPh Pasal 21 menjadi lebih hemat.

Pembahasan

PT XXX di Pekanbaru menerapkan perincian PPh Pasal 21 untuk pendapatan karyawan tetap searah dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perolehan pengkajian mengidentifikasi adanya kekeliruan dalam perhitungan PPh 21, dimana PT XXX masih menggunakan perhitungan Tarif Progresif sedangkan untuk tahun 2024 harus menerapkan perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya kecermatan manajemen dalam melakukan pembaruan dalam perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif TER. Berdasarkan tabel di atas, ditemukan adanya kekeliruan dalam perincian pajak. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pekerja tetap di PT XXX yang berada di Pekanbaru mengalami ketidakakuratan, dikarenakan menggunakan perhitungan lama, yaitu masih menggunakan tarif pajak progresif dan untuk awal tahun sudah mulai diberlakukan perhitungan pajak PPh 21 menggunakan (TER). Sehingga mengakibatkan perhitungan pajak PPh 21 atas karyawan PT XXX lebih tinggi dan merugikan karyawan. Berdasarkan analisis terhadap penerapan pencatatan, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan tarif efektif rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan 21 PT. XXX, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti penyempurnaan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi dan peningkatan ketepatan dalam perhitungan tarif pajak. Pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan juga diperlukan agar terhindar dari potensi kesalahan administrasi yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak otoritas pajak. Dengan melakukan perbaikan tersebut, PT. XXX dapat lebih optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi risiko potensi sanksi atau kekeliruan dalam pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan pencatatan, perhitungan, pemotongan, dan pelaporan tarif efektif rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di PT. XXX, dapat ditarik beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan

PT. XXX telah berupaya menjalankan kewajibannya dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam metode perhitungan yang digunakan. PT. XXX masih menggunakan

metode tarif pajak progresif pada awal tahun 2024, padahal seharusnya sudah beralih menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai dengan kebijakan baru yang diberlakukan pada Januari 2024.

2. **Efek Penerapan TER terhadap Karyawan**

Penerapan TER memberikan keuntungan bagi karyawan karena menghasilkan potongan pajak yang lebih kecil dibandingkan metode progresif, khususnya bagi karyawan dengan penghasilan di atas batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Namun, penerapan TER juga memiliki kelemahan, terutama bagi karyawan dengan penghasilan yang fluktuatif atau tidak tetap. Hal ini menyebabkan beberapa karyawan dikenakan potongan pajak setiap bulan, meskipun secara akumulasi tahunan penghasilan mereka berada di bawah PTKP, sehingga dapat menimbulkan potensi lebih bayar pajak.

3. **Kendala dalam Perhitungan dan Pelaporan**

Kesalahan dalam perhitungan PPh 21 disebabkan oleh kurangnya pembaruan sistem manajemen terkait metode penghitungan pajak. Perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem pencatatan yang terintegrasi, sehingga berisiko pada kesalahan administrasi dalam pemotongan maupun pelaporan pajak. Selain itu, penghasilan tambahan seperti Tunjangan Prestasi dan THR yang bersifat tidak tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap potongan pajak bulanan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang terutang setiap bulannya.

4. **Rekomendasi untuk Perbaikan**

Agar penerapan sistem perpajakan lebih optimal, PT. XXX perlu segera melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap metode penghitungan pajak sesuai aturan terbaru. Sistem pencatatan pajak harus dibuat lebih terintegrasi dan akurat untuk meminimalkan potensi kesalahan perhitungan. Selain itu, pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan diperlukan untuk menghindari kerugian, baik bagi karyawan maupun perusahaan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Dengan perbaikan ini, PT. XXX diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajaknya, mengurangi risiko administrasi yang merugikan, dan menciptakan keadilan dalam

pemotongan pajak karyawan. Implementasi sistem perpajakan yang baik tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan karyawan terhadap sistem yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cristiana. (2017). *Pendataan Penerimaan Bruto Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Fitriah, D., & Devi, H. (2015). *Analisis Penerapan Perhitungan PPh 21 di CV Nusantara*. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 6(2), 112-121.
- Fitriah, D., & Devi, H. (2021). *Panduan Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 Sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016*. *Jurnal Keuangan dan Pajak*, 9(1), 45-54.
- Herduard, R. (2015). *Pencatatan Kewajiban Pajak Perusahaan Sesuai Aturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 203-210.
- Kawulusan, D. (2021). *Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pegadaian Persero Manado Timur*. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 12(4), 98-110.
- Lunenburg, F. C. (2012). *Compliance Theory in Organizational Management: An Overview*. *International Journal of Management*, 15(2), 123-134.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2016). *PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan.